

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PEMILIK
RAHASIA PERUSAHAAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT
PERSEKONGKOLAN
Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024**

ABSTRAK

Ketiadaan definisi dan parameter yang jelas mengenai rahasia perusahaan serta kosongnya hukum terhadap pertanggungjawaban pelaku yang bukan pelaku usaha menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha pemilik rahasia perusahaan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang mengubah frasa "pihak lain" menjadi "pelaku usaha lain", sehingga individu yang terlibat dalam persekongkolan memperoleh rahasia perusahaan tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pemilik rahasia perusahaan yang dirugikan akibat persekongkolan serta pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2024. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia perusahaan belum optimal karena belum adanya parameter yang jelas mengenai rahasia perusahaan serta adanya kekosongan pengaturan mengenai pertanggungjawaban individu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui penegasan parameter rahasia perusahaan dan pengaturan pertanggungjawaban individu guna mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci : Rahasia Perusahaan, Persekongkolan, Persaingan Usaha

**LEGAL PROTECTION FOR BUSINESS OWNERS OF TRADE SECRETS
HARMED BY COLLUSION: A STUDY OF KPPU DECISION NUMBER
08/KPPU-L/2024**

ABSTRACT

The absence of a clear definition and legal parameters regarding trade secrets, coupled with the legal vacuum concerning the liability of individuals who do not qualify as business actors, indicates that Article 23 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition has not yet provided adequate legal protection and legal certainty for business actors owning trade secrets. Furthermore, following Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XIV/2016, which replaced the phrase "other parties" with "other business actors", individuals involved in conspiracies to obtain trade secrets can no longer be held liable under Law Number 5 of 1999. This research aims to analyze the legal protection afforded to business actors whose trade secrets have been unlawfully obtained through conspiracy, as well as the legal reasoning of the Commission Panel of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Decision Number 08/KPPU-L/2024. This study employs a normative juridical research method using statutory and case approaches. The findings reveal that legal protection for trade secret owners remains inadequate due to the absence of clear legal parameters defining trade secrets and the legal vacuum concerning individual liability following Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XIV/2016. Therefore, a reformulation of Article 23 of Law Number 5 of 1999 is necessary by establishing explicit legal parameters for trade secrets and regulating individual liability to ensure more effective legal protection and legal certainty.

Keywords: Trade Secrets, Conspiracy, Business Competition.